

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI
POLITIK BARU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
(STUDI KASUS DPD PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA KOTA PAREPARE)**

Aditya Putra

Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Email: Adityaputra.marzuki@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, terbilang rendah. Hal ini menjadi perhatian ketika memasuki pemilu serentak pada tahun 2019 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia dimana pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, partai politik baru, utamanya partai politik yang khusus menasar segmen pemilih pemula seperti Partai Solidaritas Indonesia perlu memiliki strategi komunikasi politik yang inovatif dan kreatif untuk menarik minat para pemilih pemula. Hasil analisis penelitian kemudian mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sekaligus meningkatkan perolehan suara calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, baik pada tataran komunikator, pesan, saluran, komunikan, serta efek dan feedback. Secara umum, usaha Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare untuk meraih suara pada pemilu serentak tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, sebagai akibat dari hambatan yang dihadapi partai tersebut, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Namun secara khusus, kehadiran partai ini telah ikut meningkatkan partisipasi politik kelompok muda dan pemilih pemula di kota Parepare.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Strategi Komunikasi, Komunikasi Politik

Abstract

Political participation for young and new voters in Indonesia, particularly in Parepare, is fairly low. This has come in light during simultaneous election in 2019, which was the first election in Indonesia where legislative

and executive legislation were held in the same time. Which is why, as a new political party, especially the ones that targetted new voters such as Partai Solidaritas Indonesia (Indonesia's Solidarity Party) needs to have an innovative and creative political communication strategy to attract the attentions of these new voters. This research analysis identifies these political communication strategy being used by Partai Solidaritas Indonesia branch Parepare, South Sulawesi, in their attempts to increase new voter's political participation as well to heightened PSI's vote, whether at the level of communicator, messages, channels, audience, and effect or feedbacks. By using observation and interview methods this research discovered that generally, Partai Solidaritas Indonesia's attempt to seize significant votes in the 2019's election were failing, due to several obstruction stems from internal causes as well as external ones. But in particular, the presence of this party has contributed to the increasing political participation of young and new voters in Parepare, South Sulawesi.

Keywords: *Political Participation, New Voters, Communication Strategy, Political Communication*

A. Pendahuluan

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019. Pemilihan Umum tersebut adalah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia ketika pemilihan Presiden dan anggota DPR/D dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Terdapat 16 peserta partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu tersebut, dan beberapa diantaranya adalah partai-partai baru.

Salah satu partai baru yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat adalah Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang berdiri pada 16 November 2014 ini diketuai oleh Grace Natalie, seorang mantan pembawa acara berita dan jurnalis. Partai Solidaritas Indonesia resmi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 setelah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan merupakan satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pemilihan Presiden tahun 2014.

Partai Solidaritas Indonesia cabang Kota Parepare sendiri mulai aktif melaksanakan kegiatan kampanye politik

pada tahun 2017, atau pada saat menjelang dilaksanakannya Pemilihan Walikota Parepare. Setelah menetapkan dukungannya terhadap pasangan no urut 1, yaitu petahana walikota Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim, PSI Kota Parepare kemudian mulai aktif mengikuti kampanye politik yang diselenggarakan oleh koalisi partai politik pendukung pasangan petahana tersebut. Berdasarkan observasi lapangan dan publikasi pada media sosial milik DPD PSI Kota Parepare, kegiatan politik DPD PSI Parepare tersebut didominasi oleh pemuda ataupun orang-orang yang berumur dibawah 40 tahun. Ada alasan tertentu mengapa kelompok pemilih pemula selama ini hanya dijadikan ceruk suara alihalih sebagai kelompok potensial pengurus partai ataupun sebagai anggota legislatif; dimana kelompok umur tersebut dipandang masih labil, kurang mampu berpolitik, maupun akibat karakteristik khas orang muda yang dianggap tidak cocok untuk proses politik. Disisi lain, rendahnya partisipasi politik pemilih pemula juga diakibatkan salah satunya oleh kurangnya pendidikan politik yang mereka peroleh. Ini menunjukkan kegagalan partai politik lama dalam melakukan salah satu fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik. Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Parepare memperlihatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi pemilih pemula pada pemilu yang berlangsung pada tahun-tahun sebelum kehadiran Partai Solidaritas Indonesia, yaitu pilgub 2007, pileg dan pilpres2009, pilgub 2013, dan pileg 2014. Kurangnya partisipasi politik kelompok muda juga tampak pada anggota legislatif yang menjabat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Parepare saat ini yang didominasi oleh kelompok umur 40 tahun keatas. Oleh karena itu, sebagai partai politik baru yang menysasar kelompok pemilih pemula, DPD PSI Kota Parepare perlu memiliki strategi komunikasi yang spesifik dan inovatif dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih

pemulayang menjadi targetnya, sekaligus untuk memenuhi tujuan PSI dalam memperoleh suara demi meraih kursi di DPRD Kota Parepare.

Namun pemilu serentak tahun 2019, yang merupakan pemilu serentak pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia, tentu menghadirkan dinamika baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Terlebih lagi untuk partai politik baru seperti PSI. Persoalan dan tantangan yang muncul, baik dari internal maupun eksternal partai tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PSI dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih pemula. Dan semua itu harus dihadapi oleh para pengurus dan anggota DPD PSI Kota Parepare yang maju menjadi calon anggota legislatif, sebagai ujung tombak kegiatan politik PSI kota Parepare. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul berupa “Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula” untuk mengidentifikasi upaya-upaya Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare tersebut, sekaligus hasilnya dalam perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare pada pemilu tahun 2019.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menurut Mukhtar¹ adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu, dengan prosedur

¹ Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta : GP Press Group, 2013

pemecahan masalah yang menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan data, informasi, dan kendala terkait strategi komunikasi politik PSI Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu². Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Parepare. Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi komunikasi politik PSI kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Sampel adalah contoh, representasi, atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. Penarikan sampel kemudian menggunakan teknik Snowball Sampling. Tujuan peneliti mengambil sampel ini adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan mengamati sebagian saja dari populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan karena seringkali tidak memungkinkan untuk mengamati segenap pengurus dari populasi yang besar jumlahnya. Sampel yang dikehendaki dianggap representatif dapat menjawab permasalahan yang

² Hadar Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gama Pers, 1987

dihadapi sesuai tujuan penelitian ini pada tataran operasionalnya, peneliti terfokus pada pengurus PSI Kota Parepare, anggota biasa, dan anggota PSI kota Parepare yang menjadi calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019, yaitu :

1. Pengurus DPC PSI Kota Parepare Adriawan Natsir Susanto
2. Pengurus DPC PSI Kota Parepare Ahmad Kamal
3. Pengurus DPD PSI Kota Parepare Jonas Barobo
4. Pengurus DPD PSI Kota Parepare Dedi Iswadi
5. Calon Legislatif Daerah Pemilihan Soreang Muh. Syaifullah S
6. Anggota PSI Kota Parepare Mifta Novianti Putri
7. Anggota PSI Kota Parepare Muh. Ammar

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam hal ini penulis sebagai instrumen utama penelitian menjadikan observasi lapangan sebagai data utama, ditunjang oleh keterangan dari pengurus DPD , DPC, calon legislatif, dan anggota PSI Kota Parepare sebagai informan dalam mencari data-data yang diperlukan dan dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat data primer, yang diperoleh dari buku-buku, literature seperti buku strategi

sosialisasi politik, strategi partai politik, serta karya-karya, dokumentasi, dan media internet terkait objek penelitian. Berdasarkan penjelasan ini maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota PSI Kota Parepare.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu:

1. Metode observasi lapangan

Observasi pada dasarnya adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari)³ kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkancana⁴ adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi lapangan selama proses kampanye PSI Kota Parepare, dan ikut terlibat sebagai anggota PSI agar dapat mengikuti rapat-rapat dan kampanye secara langsung

2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono⁵, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi awal untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

³ Suardeyasari. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia. 2010

⁴ ibid

⁵ Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. 2013

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶ Wawancara memiliki tujuan untuk menampilkan konstruksi saat ini dalam suatu kerangka tentang para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, dsb; kemudian hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan yang dapat timbul di masa yang akan datang. Responden yang diwawancarai juga berperan sebagai pengamat yang kemudian memberikan jawaban kepada peneliti mengenai gejala-gejala yang sedang diteliti. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung antara peneliti dengan informan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*)⁷. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan teknik snowball sampling yaitu pewawancara tidak menetapkan jumlah responden. Apabila responden pertama dirasa sudah cukup memberikan semua data yang dibutuhkan, maka wawancara kembali kepada responden kedua. Wawancara tersebut ditunjukkan kepada para pengurus dan anggota Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik partai PSI untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum, jurnal, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini⁸”. Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode

⁶ ibid

⁷ Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS. 2017. hal. 111

⁸ Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1998. hal. 133

pelengkap, dimana Peneliti melakukan pencatatan terhadap data yang dianggap penting dan berkaitan dengan pola dan strategi kampanye Partai Solidaritas Indonesia, baik kota Parepare maupun di wilayah lain, untuk selanjutnya disusun dan dianalisis.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan yang terkait dengan strategi kampanye dan pola komunikasi politik PSI Kota Parepare kepada pemilih pemula

C. Hasil dan Pembahasan

Partai politik merupakan suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka⁹. Cheppy Hari Cahyono¹⁰ mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu yaitu: (1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan

⁹ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2008 hal. 160-161

¹⁰ Cheppy H. Cahyono. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991. Hal. 195-196

masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan. Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain.

3. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen). Selain itu juga untuk proses kaderisasi untuk melanjutkan kepemimpinan didalam partai tersebut.

4. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur tidak sedikit melahirkan konflik, semua beradu untuk mendapatkan kemenangan, disamping mudah terpicu konflik horizontal diantara warga masyarakat, juga tidak sedikit melahirkan konflik structural penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Pada kondisi demikian, partai politik harus dapat tampil sebagai penengah, menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan kehendak penguasa politik kepada masyarakat¹¹.

Adapun partisipasi politik seperti yang dinyatakan Davis¹² memiliki fungsi untuk mempengaruhi penguasa, baik itu memperkuat ataupun untuk menekan, agar mereka memperhatikan ataupun memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Sedangkan bagi pemerintah itu sendiri, partisipasi politik dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memberikan *feedback* maupun masukan bagi pemerintah untuk mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Dengan demikian, sasaran partisipasi politik tersebut adalah pemerintah serta instansi yang berwenang dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi adalah salah satu prinsip mendasar dari good government. Partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian, dan *capere* yang bermakna mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan

¹¹ Haryanto. Partai Politik Suatu Tinjauan Umum. Liberty:Yogyakarta. 1984. Hal. 11

¹² S. Sastroadmojo. Partisipasi Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. 1995.

politik negara. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* dapat dimaknai sebagai mengambil bagian atau peran; dengan demikian partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara¹³. Partisipasi politik itu sendiri adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi, yang menjadi ciri khas dari modernisasi politik. Warga negara berhak untuk ikut berperan serta dalam menentukan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, ketika kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin¹⁴ adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tingginya tingkat partisipasi politik kemudian dapat menjadi indikator bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik, serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah akan menjadi tanda yang kurang baik, karena menunjukkan hal yang sebaliknya. Dengan berkaca pada hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare berdiri pada tanggal 3 Mei 2016. Pada awal berdirinya, PSI kota Parepare lebih aktif pada penambahan anggota baru dan menyebarkan pesan-pesan politik melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Setelah mengikuti kopdarwil PSI Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2016, PSI Kota Parepare mulai aktif mengunggah narasi-narasi politik pada laman media sosial mereka, baik yang berasal dari laman media sosial PSI Indonesia ataupun laman pribadi pengurus-pengurus pusat PSI.

Komposisi pengurus PSI kota Parepare sendiri diisi oleh

¹³ Suharno. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Yogyakarta. 2004. Hal. 102-103

¹⁴Cholisin, Diktat Civil Society “Civic Education Corner”.Jurnal PKn dan Hukum Universitas Negeri Yoyakarta. 2007. Hal 150

orang-orang muda berumur dibawah 35 tahun, dimana struktur Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare adalah sebagai berikut:

- Ketua Dewan Pengurus Daerah Muh. Iqbal Usman
- Wakil Ketua Dedi Iswadi
- Sekretaris Novi
- Wakil Sekretaris Jonas Barobo

Sedangkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) terbagi menjadi 3, yaitu;

- DPC Soreang, yang diketuai oleh Susanto Adriawan Natsir
- DPC Ujung, yang diketuai oleh Ahmad Kamal
- DPC Bacukiki, yang diketuai oleh Sofyan Setiawan

Adapun kiprah politik PSI kota Parepare dalam panggung politik lokal dimulai pada tahun 2017-2018, yaitu ketika kota Parepare melaksanakan pemilihan walikota. Pada saat itu, Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare yang dipimpin oleh ketuanya, yaitu Muhammad Iqbal Usman, mulai aktif merekrut anggota dan melakukan pendekatan politik dengan calon walikota yang akan maju pada kontestasi tersebut, yaitu calon no urut 1 petahana Dr. H. Taufan Pawe, S.H., M.H dan calon no. urut 2 yaitu Ir. H. Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. Setelah melalui berbagai pertimbangan, PSI kota Parepare kemudian memutuskan untuk menjatuhkan dukungannya kepada calon no. urut 1, dan dengan demikian resmi masuk ke dalam koalisi partai-partai pendukung calon no. urut 1¹⁵.

PSI kota Parepare memiliki keuntungan dengan masuk pada koalisi partai pendukung petahana, sebab petahana tersebut memiliki dukungan mayoritas, yaitu dengan 16 kursi dari lima

¹⁵<https://makassar.tribunnews.com/2018/02/11/psi-perkuat-gerbong-taufan-pawe-pangeran-rahim,diakses pada tanggal 13 Agustus 2019>

partai yakni Golkar (5), Demokrat (4), PDIP (3), PAN (3) dan Gerindra (1). Sedangkan lawannya mengantongi enam dari total 25 kursi. Keenam kursi yang mengusungnya tersebut yakni Nasdem (2 kursi), PKS (2 kursi), PPP (1 kursi) dan PKB (1 kursi)¹⁶. Jumlah dukungan yang mayoritas dari koalisi parpol tersebut menyebabkan PSI kota Parepare sebagai partai baru dapat mengambil keuntungan dengan mempublikasikan diri kepada masyarakat Parepare melalui atribut-atribut partai maupun aksi-aksi anggota partai ketika berlangsungnya rapat akbar ataupun kampanye-kampanye. PSI kota Parepare juga tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika merumuskan agenda kampanye politik, sebab ada partai-partai lain yang lebih senior, dengan pengalaman dan kemampuan politik kadernya, yang menjadi patokan pada saat itu.

Kondisi ini kemudian hilang ketika PSI memasuki pemilu legislatif dan eksekutif serentak yang diadakan pada tahun 2019. Partai-partai yang sebelumnya merupakan kawan, kemudian berbalik menjadi kompetitor, dan PSI Kota Parepare kemudian harus berjalan sendiri dalam merumuskan dan melaksanakan strategi komunikasi politik untuk mencapai tujuan partai politik tersebut, yaitu meraih dukungan dan suara pemilih pada pemilu serentak tersebut.

5. Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare

Strategi dalam komunikasi merupakan usaha untuk mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar mampu mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik

¹⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/resmi-pilwali-parepare-diikuti-2-pasang-calon>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019

operasionalnya¹⁷. Oleh karena itu, sebelum melakukan komunikasi, maka komunikator harus mampu terlebih dahulu membuat strategi komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal¹⁸.

Dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan¹⁹. Dengan demikian, strategi komunikasi adalah tahapan nyata dalam rangkaian aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. Adapun teknik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana yang meliputi metode, teknik, dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, pada hakekatnya adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan strategi komunikasi politik memiliki peranan yang sangat esensial; selain untuk mengetahui arah kegiatan politik, juga untuk memperoleh dukungan publik secara politik. Berikut ini adalah beberapa

¹⁷ Yusuf Zainal Abidin, Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi), Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal 155

¹⁸ Hafied Cangara, Perencanaan Strategi Komunikasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal 61

¹⁹ Onong Uchana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005

elemen perencanaan komunikasi politik yang perlu diperhatikan, yang diadopsi dari perencanaan Public Relation²⁰:

1. Hasil yang diharapkan, yang terbagi dalam hasil utama serta hasil khusus. Berkenaan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan tujuannya, yang tujuannya adalah *information based* (mis. mendidik atau sosialisasi) atau *action-based* (mis. Penggalangan dana, membentuk opini publik, dsb).
2. Khalayak yang menjadi sasarannya. Sasaran ini harus ditentukan se jelas mungkin, untuk kemudian dibuat daftarnya secara berurutan sesuai dengan prioritas masing-masing.
3. Strategi atau metode dasar dalam bertindak. Strategi ini merupakan posisi umum atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai *goal* dan obyektif.
4. Taktik atau metode/alat khusus yang digunakan untuk menjelaskan perubahan manajemen yang dapat terjadi.
5. Anggaran dan waktu, yaitu bagaimana perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
6. Evaluasi, yaitu proses penilaian untuk mengetahui keberhasilan atau kelemahan dari perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk survei opini atau analisis media.

Sebagai partai politik baru, PSI kota Parepare pada dasarnya mengikuti kebijakan pengurus pusat partai. Pada event pembekalan akbar calon anggota legislatif PSI Se-Sulawesi Selatan tanggal 22 September 2018 di Hotel Karebosi Kondotel yang dihadiri oleh pengurus pusat PSI, dimana penulis ikut serta didalamnya, telah dijabarkan beberapa arahan mengenai model

²⁰ Harsono Suwandi. Politik, Demokrasi, dan Manajemen Komunikasi. Yogyakarta: Galang Press. 2002

komunikasi politik PSI dalam menghadapi pemilu serentak²¹. Pada presentasinya, arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Komunikator

Pada tataran aktor pembawa pesan atau komunikator, yang menjadi komunikator adalah anggota PSI secara keseluruhan, dengan calon anggota legislatif yang maju sebagai ujung tombaknya.

b. Pesan

Pada tingkatan pesan, yang menjadi fokus pesan pada dasarnya adalah muatan-muatan yang membawa kesan positif terhadap para calon anggota legislatif PSI secara khusus, dan terhadap Partai Solidaritas Indonesia secara umum. Sesuai dengan tagline PSI, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi, maka pesan-pesan politik anggota PSI berpusat pada hal tersebut. Anggota PSI diarahkan untuk membentuk opini publik bahwa PSI adalah partai baru yang dapat menjadi anti-tesa partai-partai lama yang korup dan mendukung intoleransi. Adapun mengenai pesan-pesan politik lainnya yang akan diangkat, diserahkan sepenuhnya pada para anggota PSI di daerah masing-masing, selama tidak menyalahi ketentuan partai.

c. Media

Terdapat beberapa media atau saluran yang menjadi acuan untuk digunakan dalam komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia, yaitu media konvensional seperti surat kabar, majalah, televisi, serta media online seperti media sosial ataupun jejaring pertemanan. Selain itu, PSI juga mengikuti metode konvensional partai-partai politik lainnya dengan menggunakan atribut seperti baju

²¹ <https://makassar.terkini.id/bacaleg-psi-berikan-pembekalan-dihadiri-gubernur-sulsel/> diakses pada tanggal 17 April 2019

kaos, bendera, pamlet, dan lain sebagainya, untuk menyebarkan pesan politik dan sebagai media kampanye politik.

d. Khalayak

Yang menjadi sasaran utama komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia adalah kelompok muda dan para pemilih pemula. Segmentasi ini konsisten dengan image branding yang dilakukan oleh PSI dengan mengklaim sebagai partai anak muda. Namun hal ini tidak menjadikan PSI tidak menasar kelompok masyarakat umum, sebab para calon anggota legislatif PSI diarahkan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui semua segmen pemilih yang ada, tentunya yang sejalan dengan visi misi dan tujuan partai tersebut.

e. Efek

Seperti umumnya, efek yang diharapkan dari komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia adalah bertambahnya dukungan terhadap partai tersebut, baik dalam bentuk simpati masyarakat ataupun penambahan jumlah anggota/kader partai. Adapun efek jangka pendek yang diinginkan adalah bertambahnya jumlah pemilih yang akan memilih para calon anggota legislatif dari partai ini.

Selanjutnya, perlu dilakukan sebuah perencanaan komunikasi politik yang menciptakan keteraturan dan kejelasan arah. Fungsi ini merupakan tahap yang harus dilakukan agar strategi komunikasi politik dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tahapan perencanaan kampanye dari Gregory yang bisa diadopsi oleh sebuah perencanaan dalam strategi komunikasi politik, tahap-tahap tersebut meliputi:

- **Analisis Masalah**

Langkah awal suatu perencanaan adalah melakukan analisis masalah. Agar dapat diidentifikasi dengan jelas, maka analisis masalah hendaknya dilakukan secara terstruktur. Pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan harus dilakukan secara objektif dan tertulis serta memungkinkan untuk dilihat kembali setiap waktu.

- **Penyusunan Tujuan**

Tujuan harus disusun dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat realistik. Penyusunan tujuan yang realistik ini merupakan hal yang harus dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. Ada beragam tujuan yang bisa dicapai dengan menggunakan strategi komunikasi politik. Tujuan tersebut di antaranya adalah menyampaikan sebuah pemahaman baru, menciptakan kesadaran, memperbaiki sebuah citra, membentuk persepsi, serta mengajak khalayak untuk melakukan tindakan tertentu.

- **Identifikasi dan Segmentasi Sasaran**

Dengan melakukan identifikasi dan segmentasi sasaran maka proses perencanaan selanjutnya akan lebih mudah dan tepat pada sasaran. Untuk mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran perlu dilakukan pelapisan sasaran, yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, sasaran lapis dua, dan seterusnya sesuai dengan tujuan.

- **Menentukan pesan**

Perencanaan pesan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam perencanaan komunikasi politik. Pesan komunikasi politik merupakan sarana yang akan membawa sasaran mengikuti apa yang diinginkan dari

program-program komunikasi politik yang pada akhirnya akan sampai pada pencapaian tujuan.

- **Strategi dan Taktik**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam komunikasi politik, atau untuk lebih mudahnya dapat disebut sebagai guiding principle, atau the big idea. Taktik sangat bergantung pada tujuan dan sasaran yang akan dibidik. Semakin kompleks tujuan dan sasaran bidik maka taktik yang digunakan harus semakin kreatif dan variatif.

- **Alokasi waktu dan sumber daya**

Komunikasi politik selalu dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Ada kalanya rentang waktu tersebut berasal dari pihak luar, misalnya waktu kampanye dalam pemilu. Sementara itu, pengalokasian dana operasional hendaknya didasarkan pada efektifitas dan efisiensi.

- **Evaluasi**

Evaluasi berperan penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang dihasilkan. Karena hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai tinjauan untuk program-program yang akan dilakukan selanjutnya, maka evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terstruktur.

Dengan menggunakan konsep tersebut, hasil penelitian di lapangan menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. **Komunikator**

Sesuai dengan arahan dari DPD PSI Pusat, ujung tombak yang menjalankan peran komunikator adalah para calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilihan legislatif serentak pada tahun 2019. Demikian pula dengan PSI Kota Parepare. Ada 10 orang calon anggota

legislatif yang kemudian didaftarkan oleh PSI kota Parepare untuk mengikuti pileg 2019, yaitu:

No	Nama	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan
1	Sofyan Setiawan	laki-laki	I (Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
2	Sukrianti	perempuan	I (Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
3	Andi Irvan R	laki-laki	I (Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
4	Muh. Yusran H.	laki-laki	II (Kecamatan Ujung)
5	Muh. Iqbal Usman	laki-laki	II (Kecamatan Ujung)
6	Devi Angrainy	perempuan	II (Kecamatan Ujung)
7	Nurafni	perempuan	III (Kecamatan Soreang)
8	Muh. Syaifullah S.	laki-laki	III (Kecamatan Soreang)
9	Irfan Nurhayati Herman	laki-laki	III (Kecamatan Soreang)
10	Yuliana	perempuan	III (Kecamatan Soreang)

Metode penjaringan bakal calon legislatif PSI, berdasarkan situs resmi PSI, merupakan sistem terbuka, dimana para bacaleg akan diseleksi berdasarkan hasil wawancara dengan panelis-panelis untuk mengukur keahlian dan kompetensi mereka²². Namun pada PSI kota Parepare, metode penjaringan bacaleg tidak mengikuti hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon anggota legislatif itu sendiri, proses pemilihan bacaleg kota Parepare tidak melalui proses seleksi oleh panelis sesuai bidang keahlian masing-masing, melainkan hanya melalui proses pendaftaran. Salah seorang bekas caleg PSI kota mengatakan bahwa "...Tidak ada proses seleksi. Hanya perlu

²² <https://psi.id/berita/2018/04/29/psi-seleksi-150-bacaleg/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019

mendaftar sebagai caleg saja”²³. Para bacaleg yang didaftarkan tersebut, selain memenuhi kriteria utama bacaleg PSI yaitu berumur dibawah 35 tahun, kemudian juga memenuhi persyaratan minimal pendaftaran caleg di Komisi Pemilihan Umum, yaitu memenuhi keterwakilan perempuan (1 orang caleg perempuan untuk 2 orang caleg laki-laki). Adapun persyaratan keahlian dan kompetensi tidak menjadi ketentuan utama dalam proses penjaringan tersebut, sesuai dengan hasil temuan lapangan.

b. Pesan

Pesan komunikasi politik PSI kota Parepare tampak menekankan pada muatan “pemuda”, anti korupsi” dan “anti intoleransi”, yang dibungkus dalam gaya komunikasi anak muda atau generasi milenial. Muatan tersebut dibawakan secara umum, termasuk ketika mengomentari isu-isu relevan yang tengah terjadi atau menjadi perbincangan umum pada saat itu.

c. Media

Komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare dan para calon anggota legislatifnya pada dasarnya menggunakan media-media yang tersedia, baik itu media konvensional maupun media sosial. Namun media sosial dan portal berita online memperoleh porsi yang jauh lebih besar dibandingkan media konvensional seperti iklan politik ataupun publikasi caleg di koran atau surat kabar. Para caleg tersebut mayoritas menggunakan laman media sosial pribadi mereka untuk melakukan kampanye ataupun mengunggah narasi-narasi politik mereka. Para caleg melakukan komunikasi selain secara tidak langsung, juga melakukan komunikasi tatap muka atau langsung, umumnya dalam

²³ Hasil wawancara dengan Muh Syaifullah, caleg PSI Kota Parepare

bentuk *canvassing* atau metode *door-to-door*; yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang menjadi konstituennya. Yang unik pada model komunikasi para caleg PSI kota Parepare adalah menitik-beratkan pula pada pendekatan ke komunitas-komunitas anak muda ataupun organisasi yang mereka ikuti. Hal ini dikarenakan sebagai anak muda, mereka aktif berorganisasi maupun berkumpul dengan anak-anak muda lainnya yang memiliki minat atau kesamaan hobi. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi salah satu pilihan, karena selain ekonomis, juga kemudahan dalam berkomunikasi dikarenakan kedekatan mereka dengan khalayak atau basis massa yang disasar.

d. Khalayak

Yang menjadi target atau sasaran komunikasi politik para caleg PSI kota Parepare dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keluarga dan kerabat dekat, kelompok pemilih pemula yang pada umumnya terdiri atas teman-teman dan rekan organisasi/kerja mereka, serta masyarakat umum.

e. Efek

Efek yang diharapkan dapat tercapai oleh komunikasi politik caleg PSI kota Parepare dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Efek jangka panjangnya adalah sosialisasi mengenai keberadaan, visi misi, serta muatan-muatan positif mengenai PSI kepada masyarakat umum kota Parepare, sehingga kedepannya masyarakat tersebut akan bersimpati dan mendukung PSI, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Selain itu, yang menjadi tujuan efek juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek kepada PSI sebagai sebuah partai politik, dan efek kepada para caleg sebagai individu. Sebab para caleg

tesebut merupakan orang-orang yang baru berkecimpung di dunia politik, sehingga mereka perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka di dunia politik lokal.

f. Alokasi Dana dan Waktu

Salah satu komponen penting dalam perencanaan komunikasi politik adalah dana operasional dan waktu yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan pernyataan dari ketua PSI kota Parepare Muh. Iqbal Usman, PSI kota Parepare tidak mengelola dana operasional untuk kegiatan kampanye, baik partai maupun perorangan caleg. Dengan demikian, dana operasional menjadi tanggung-jawab masing-masing calon anggota legislatif.

g. Strategi Dan Taktik

Seperti halnya pada alokasi dana dan waktu, DPD PSI kota Parepare menyerahkan sepenuhnya permasalahan strategi dan taktik komunikasi kepada masing-masing caleg. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan strategi tiap-tiap caleg yang ditemui di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, PSI kota Parepare tidak pernah melangsungkan rapat akbar atau kampanye akbar di Kota Parepare. Mayoritas caleg PSI kota Parepare melakukan kampanye tatap muka secara langsung, berkeliling ke rumah-rumah warga, ataupun menyebarkan stiker dan pamphlet; termasuk juga menggunakan kendaraan roda 4 sebagai media kampanye dengan menempelkan stiker kampanye. Beberapa caleg juga melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan politik publik seperti salah satunya tudang sipulung

lintas partai²⁴ serta konsensus bersama caleg muda menolak *money politics*²⁵. Terdapat pula kader PSI yang “membantu mengampanyekan calon melalui media sosial”²⁶

h. Evaluasi

Selama periode kampanye hingga selesainya pileg dan pilpres serentak tahun 2019, PSI Kota Parepare tidak pernah mengadakan evaluasi proses kampanye maupun komunikasi politik yang berlangsung. Segala sesuatunya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing calon anggota legislatif.

6. Kendala Yang Dihadapi

Dalam usaha penerapan strategi komunikasi politik tersebut, ditemui kendala di lapangan yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu kendala yang berasal dari dalam (internal), serta kendala yang berasal dari luar organisasi (eksternal). Kendala internal tersebut beberapa diantaranya adalah:

- a. Kader dan Pengurus yang minim pengalaman politik, menjadikan proses organisasi di DPD PSI Kota Parepare tidak berjalan sesuai dengan aturan. Terdapat banyak penyimpangan dari AD/ART partai yang terjadi didalamnya, seperti misalnya kepengurusan yang tidak dibekali oleh SK (Surat Keputusan) pengurus, tidak adanya agenda partai yang berjalan seperti penyaringan

²⁴ <https://www.pijarnews.com/caleg-muda-parepare-bertemu-ini-yang-dibahas/> diakses pada tanggal 5 September 2019

²⁵ <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/17/belasan-caleg-lintas-partai-di-parepare-komitmen-tolak-politik-uang> diakses pada tanggal 6 September 2019

²⁶ Hasil wawancara dengan Ammar Rahmatullah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare

bacaleg, perkaderan, pembekalan kemampuan politik, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang bekas pengurus yang mengatakan bahwa “...kami sebagai pengurus tidak tahu menahu soal job desk kami, struktur yg tdk jelas, (bendahara) kami gak pernah lihat, sistem laporan keuangan tidak transparans dan tidak pernah ada LPJ masalah keuangan partai”²⁷. Imbas dari tidak berjalannya mekanisme penyaringan bacaleg sendiri adalah terpilihnya caleg yang bermasalah, yaitu atas nama Nurafni, yang dicurigai melakukan tindak pidana penggelapan uang arisan. Beberapa jabatan pengurus yang vital seperti bendahara dan sekretaris tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten setelah pengurus terdahulu mengundurkan diri maupun tidak aktif lagi. Kemudian tidak adanya laporan keuangan dan transparansi dalam PSI kota Parepare, apabila dibandingkan dengan DPD PSI di kota lainnya, namun tidak pernah ada penjelasan yang memadai terkait hal tersebut. Sementara laporan rutin keuangan adalah mekanisme wajib yang diatur didalam AD/ART PSI. Konflik seperti ini tidak hanya dialami oleh PSI kota Parepare, namun konflik serupa ternyata juga terjadi di PSI Bekasi²⁸ dan PSI Nusa Tenggara Barat²⁹. Selain itu tidak ada mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa agenda partai sudah berjalan, baik agenda internal maupun agenda eksternal.

²⁷ Wawancara dengan Susanto Adriawan Natsir bekas Ketua DPC PSI Soreang

<https://indopos.co.id/read/2019/10/21/202071/banyak-kejanggalan-dan-tidak-beretika-enam-ketua-dpc-psi-bekasi-mundur/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

²⁹ <https://hariannusa.com/2018/09/23/caleg-psi-ntb-ramai-ramai-mundur/> diakses padatanggal 16 April 2019

- b. Proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara pengurus DPD PSI Kota Parepare, sehingga menimbulkan konflik internal diantara anggota-anggota PSI Kota Parepare. Beberapa konflik internal tersebut diantaranya adalah pemecatan beberapa anggota partai PSI Kota Parepare oleh ketua DPD PSI Kota Parepare secara sepihak tanpa melalui mekanisme kepartaian yang berlaku, ketidak-percayaan anggota-anggota PSI Kota Parepare terhadap ketua DPD PSI Kota Parepare, dan lain sebagainya.
- c. Kondisi psikologis sebagai orang muda dengan kondisi emosi yang masih sering labil, ditambah dengan tidak adanya tokoh senior yang dapat menjadi penengah didalam DPD PSI Kota Parepare, turut menjadi penyebab konflik internal yang mengakibatkan PSI kota Parepare tidak berfungsi sebagaimana-mestinya. Kondisi ini diperparah dengan pengunduran diri kader-kader partai tersebut, sehingga roda kepartaian menjadi pincang³⁰.

Adapun kendala eksternal yang dihadapi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitaan di media terkait beberapa pernyataan elit PSI yang kontroversial, contohnya penolakan terhadap perda syariah maupun penolakan terhadap praktek poligami dan larangan poligami bagi kader-kader PSI. Meskipun pernyataan tersebut apabila dilihat secara keseluruhan sebenarnya merupakan pernyataan yang wajar (mis. penolakan terhadap perda syariah yang bersifat diskriminatif, seperti adanya peraturan jam malam dan peraturan daerah berdasarkan agama yang

³⁰ <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/3-alasan-kader-caleg-psi-ramai-ramai-mundur-di-parepare-duit-partai-hingga-ada-yang-amburadul> diakses pada tanggal 17 April 2019

membatasi gerak kaum perempuan³¹, maupun larangan poligami bagi kader PSI yang merupakan hak partai dan tidak melanggar HAM³²) namun memberikan kesan negatif terhadap PSI (mis. di cap sebagai partai anti agama³³).

- b. Adanya resistensi masyarakat terhadap PSI sebagai akibat dari terbentuknya opini publik yang negatif. Dalam salah satu survey litbang Kompas, PSI menjadi partai baru yang paling tinggi tingkat resistensi atau penolakan dari masyarakat, yaitu mencapai 5.6%. Angka tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan partai baru lain seperti Perindo dengan resistensi sebesar 1,9 persen, kemudian partai Berkarya dengan angka resistensi sebesar 1,3 persen, dan terakhir Garuda yang nilai resistensinya 0,9 persen³⁴.
- c. Adanya persaingan dari partai-partai politik lain.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan perolehan suara PSI kota Parepare pada pemilihan legislatif 2019 terbilang sangat rendah. Dari 3 daerah pemilihan, PSI kota Parepare hanya memperoleh 159 suara di dapil I dengan jumlah caleg 3 orang, 84 suara di dapil II dengan jumlah caleg 3 orang, dan 43 suara di dapil III dengan jumlah caleg 4 orang³⁵, dari total jumlah DPT

³¹ <https://www.merdeka.com/politik/ketum-psi-tegaskan-tolak-perdasyariah-yang-diskriminatif.html> diakses pada tanggal 17 April 2019

³² <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/15/14033381/psi-larangan-poligami-tidak-melanggar-ham> diakses pada tanggal 17 April 2019

³³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/19/pifw9d318-sikap-psi-dinilai-sebagai-bentuk-fobia-agama> diakses pada tanggal 17 April 2019

³⁴ <https://www.merdeka.com/politik/survei-kompas-psi-partai-baru-dengan-resistensi-paling-tinggi.html> diakses pada tanggal 18 April 2019

³⁵ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-hasil/wilayah/> diakses pada tanggal 25 Mei 2019

kota Parepare sebanyak 99.111 orang³⁶. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pengurus dan anggota PSI kota Parepare yang masih berumur dibawah 35 tahun, keseluruhannya menyatakan bahwa mereka masih ingin berkiprah di dunia politik, meskipun mungkin tidak dalam kapasitas sebagai anggota PSI kota Parepare lagi. Mereka juga berpendapat bahwa konflik yang terjadi serta mis-manajemen partai pada dasarnya terjadi akibat ulah oknum tertentu, dan bukan merupakan kesalahan partai tersebut secara struktural. Namun mereka juga menyesalkan mengapa kekisruhan di PSI Kota Parepare tidak mendapatkan perhatian langsung dari struktur PSI yang lebih tinggi, baik itu dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Sulsel, ataupun dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, meskipun mereka sudah beberapa kali melaporkan hal tersebut, baik secara langsung, maupun melalui laman media sosial resmi PSI.

D. Penutup

Sebagai partai politik baru di Parepare, Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare mengalami kendala dalam pelaksanaan strategi komunikasi politiknya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengalaman politik para anggotanya, tidak berjalannya fungsi edukasi politik partai, dan ulah oknum tertentu di dalamnya. Imbasnya adalah minimnya suara yang diperoleh PSI kota Parepare, sehingga PSI kota parepare tidak berhasil memenuhi tujuan jangka pendek strategi komunikasi politik partai untuk menempatkan wakil mereka sebagai anggota DPRD Kota Parepare. Namun PSI kota Parepare dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, dalam bentuk menjadikan mereka sebagai anggota partai maupun sebagai simpatisan. Komposisi pengurus

³⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2018/12/14/data-lengkap-dpt-di-parepare-hasil-perbaikan-tahap-ii> diakses pada tanggal 25 Mei 2019

maupun bacaleg PSI Kota Parepare yang sepenuhnya terdiri dari anak muda menjadi bukti nyata bahwa PSI Kota Parepare mendorong keterlibatan anak muda dan pemilih pemula dalam proses politik.

Namun kebijakan tersebut kemudian berbalik menjadi merugikan mereka, sebab minimnya pengalaman organisasi politik para pengurus dan anggotanya menjadikan agenda kepartaian tidak berjalan lancar, dan juga menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan organisasi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penyelesaian ataupun intervensi langsung dari DPW maupun DPP PSI, yang berakibat pada hengkangnya kader-kader PSI kota Parepare tersebut. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi PSI di daerah lain, terutama di Jawa. Sebagai contoh, DPD PSI DKI Jakarta justru berhasil mendudukkan kadernya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, meskipun mereka berusia muda dan baru pertama kali mendaftar sebagai calon anggota DPRD. Meskipun demikian, para kader-kader maupun simpatisan PSI kota Parepare ini sendiri menyatakan tetap akan berkecimpung didalam dunia politik, sehingga PSI kota Parepare dapat dikatakan berhasil dalam menstimulasi ketertarikan kelompok pemilih pemula terhadap proses dan dinamika politik.

Untuk kedepannya, Partai Solidaritas Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk menjadi partai besar di Indonesia. Namun ada beberapa hal dapat menjadi masukan, yaitu:

1. Proses seleksi pengurus partai perlu diperketat, terutama untuk anggota Dewan Pengurus Daerah di luar pulau Jawa, tentunya dengan mengedepankan asas kapabilitas dan transparansi.
2. Edukasi politik dan proses perkaderan bagi para anggota partai perlu harus menjadi agenda rutin, agar manajemen

agenda partai dapat berjalan dengan efisien dan transparan. Hal ini juga penting sebagai dasar pengetahuan agar kemampuan komunikasi politik kader dan pengurus PSI dapat semakin ditingkatkan.

3. Dewan Pengurus Wilayah maupun Dewan Pengurus Pusat PSI perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengurus Daerah, dan membuka saluran komunikasi yang mengedepankan asas kesamaan hak atau egaliter sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan agenda partai tersebut.
4. Memperketat proses seleksi dan penjurangan bakal calon anggota legislatif di daerah-daerah diluar pulau Jawa, agar terjadi pemerataan kualitas dan kompetensi bacaleg PSI kedepannya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*
- Cheppy H, Cahyono. Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Indonesia Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 1991, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Cholisin. 2007. Diktat Civil Society “*Civic Education Corner*”. Jurnal PKn dan Hukum Universitas Negeri Yoyakarta
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Easton, David. 1968. *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique Vol. 1, No. 2*
- Effendi, Onong Uchyana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. 1997. *No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries Mass*. Harvard University Press
- Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Rempaja Rosdakarya
- Pawito, 20017. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS
- Rush dan Althoff, 1997. *Pengantar Sosial Politik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sastroadmojo, S. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta
- Sumarno, A.P. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*
- Winangsih Syam, Nina. 2002. *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*. Bandung: Unpad

SUMBER LAINNYA

<https://makassar.tribunnews.com/2018/02/11/psi-perkuat-gerbong-taufan-pawe-pangeran-rahim,diakes> pada tanggal 13 Agustus 2019

<https://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/resmi-pilwali-parepare-diikuti-2-pasang-calon, diakses> pada tanggal 13 Agustus 2019

<https://makassar.terkini.id/bacaleg-psi-berikan-pembekalan-dihadiri-gubernur-sulsel/> diakses pada tanggal 17 April 2019

<https://psi.id/berita/2018/04/29/psi-seleksi-150-bacaleg/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019

<https://www.pijarnews.com/caleg-muda-parepare-bertemu-ini-yang-dibahas/> diakses pada tanggal 5 September 2019

<https://makassar.tribunnews.com/2019/03/17/belasan-caleg-lintas-partai-di-parepare-komitmen-tolak-politik-uang> diakses pada tanggal 6 September 2019

<https://indopos.co.id/read/2019/10/21/202071/banyak-kejanggalan-dan-tidak-beretika-enam-ketua-dpc-psi-bekasi-mundur/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

<https://hariannusa.com/2018/09/23/caleg-psi-ntb-ramai-ramai-mundur/> diakses pada tanggal 16 April 2019

<https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/3-alasan-kader-caleg-psi-ramai-ramai-mundur-di-parepare-duit-partai-hingga-ada-yang-amburadul> diakses pada tanggal 17 April 2019

<https://www.merdeka.com/politik/ketum-psi-tegaskan-tolak-perda-syariah-yang-diskriminatif.html> diakses pada tanggal 17 April 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/15/14033381/psi-larangan-poligami-tidak-melanggar-ham> diakses pada tanggal 17 April 2019

www.liputan.com

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/19/pi_fw9d318-sikap-psi-dinilai-sebagai-bentuk-fobia-agama diakses pada tanggal 17 April 2019

<https://www.merdeka.com/politik/survei-kompas-psi-partai-baru-dengan-resistensi-paling-tinggi.html> diakses pada tanggal 18 April 2019

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-hasil/wilayah/> diakses pada tanggal 25 Mei 2019

<https://makassar.tribunnews.com/2018/12/14/data-lengkap-dpt-di-parepare-hasil-perbaikan-tahap-ii> diakses pada tanggal 25 Mei 2019

WAWANCARA

Rahmatullah, Ahmar. (Mahasiswa/anggota PSI Parepare). wawancara oleh Aditya. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tanggal 1 Juli 2019

Susanto, Adriawan. (Pegawai Swasta/ Ketua DPC PSI Parepare). Wawancara oleh Aditya. Tanggal 3 Juli 2019

Iswadi, Dedi. Pegawai BUMN/Mantan Wakil Ketua PSI Parepare. Wawancara oleh Aditya. Tanggal 5 Juli 2019

Dahlan, Ahmad Kamal. (mahasiswa/ Pengurus DPD PSI Parepare). Universitas Hasanuddin. Wawancara oleh Aditya. Tanggal 8 Juli 2019

Novianti Putri, Mifta. Mahasiswi/Pengurus DPD PSI Kota Parepare. Universitas Hasanuddin. Wawancara oleh Aditya. Tanggal 8 Juli 2019

Saifullah Sukri, Muhammad. Wiraswasta/Calon Legislatif PSI Parepare tahun 2019. Parepare. Wawancara oleh Aditya. Tanggal 8 Juli 2019